

ABSTRAK

Suratman Abd Samad (01011811233) Skripsi. “Upaya Penegakan Hukum Polisi Perairan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Halsel (Studi Kasus Polairud Malut) ”. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Di bimbing oleh Muhammad Amin Hanafi SH,M HUM dan Muhammad Mufti Djafar SH,MH.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang semakin marak terjadi saat ini adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penangkapan ikan ilegal atau yang disebut *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan, penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23,000.000.000 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Halmahera selatan sendiri pada 3 tahun terakhir terdapat 9 kasus Tindak Pidana *Illegal fishing*, yang dimana pada tahun 2019 3 kasus, 2020 3 kasus dan 2023 3 kasus. Pada jelas dalam aturan bahwa Tindak pidana perikanan Sesuai dengan ketentuan regulasi yang lebih mengacu pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris di ambil dari pelaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari Wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dari pengamatan langsung. di Lapangan

Upaya Polairud Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Perairan Halsel dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya *preventif* (Pencegahan) dan upaya *represif* (Penindakan), Penegakan Hukum Secara *Represif* dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan Hukum Secara *preventif* yaitu dengan cara penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Halsel yait faktor, sarana dan Prasarana, faktor Kesadaran hukum masyarakat serta faktor ekonomi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

Suratman Abd Samad (01011811233) Thesis. "Water Police Law Enforcement Efforts Against the Occurrence of Illegal Fishing Crimes in Halsel Water Areas (Case Study of Polairud North Maluku)". Criminal Law Section, Faculty of Law, Khairun University, Ternate. Supervised by Muhammad Amin Hanafi and Muhammad Mufti Djafar.

This study aims to examine the form of illegal fishing crime that is increasingly rampant today, namely fishing using explosives carried out by several communities influenced by several factors. The Directorate of Water Police (Ditpolair) is tasked with carrying out the functions of the Water Police which include patrols, including first responders to criminal acts and search and rescue accidents in water areas, and guidance for coastal / water communities.

Based on this background, Illegal fishing or what is called illegal fishing is fishing that is carried out in violation of laws that have been established in the waters of a country. The definition of illegal fishing usually comes with unregulated and unreported fishing, making it difficult for local authorities to monitor exploited resources. According to FAO, illegal fishing has caused total losses of up to 23 billion dollars worldwide, with 30 percent of this being losses experienced by Indonesia. In South Halmahera itself, in the last 3 years there have been 9 cases of illegal fishing, of which in 2019 there were 3 cases, 2020 3 cases and 2023 3 cases. It is clear in the regulations that fisheries crimes are in accordance with regulatory provisions which refer more to Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, Amendments to Law No. 31 of 2004.

The type of research used in this research is empirical research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human actors, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out from direct observation. in the field

Polairud's efforts to enforce the law on illegal fishing in South Halte waters are carried out in 2 ways, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Repressive law enforcement is carried out by outreach to the community. Preventive law enforcement, namely by means of inquiries, investigations and arrests. Factors that hamper the enforcement of illegal fishing laws in South Korea include factors, facilities and infrastructure, community legal awareness factors and economic factors.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, Fisheries Crime